

POLA KOMUNIKASI KELOMPOK PETANI TEMBAKAU MADURA SEBAGAI BASIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI POLITIK

Tatag Handaka dan Surokim

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB)
Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Jl. Raya Telang PO Box. 2, Kamal, Bangkalan, Madura (031) 3012792
email: tatag_h@yahoo.com dan surochiemabdussalam@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang pola komunikasi kelompok petani tembakau di 3 (tiga) wilayah sentra penghasil tembakau di Madura, yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu juga meneliti tentang bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kelompok, ekonomi politik dan kebijakan publik. Paradigma penelitian yang digunakan interpretif, jenis penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif dan instrumen penelitian observasi terlibat, wawancara dan FGD. Pola komunikasi kelompok petani tembakau terbentuk melalui tiga isu yaitu, pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran. Opinion leader dalam komunikasi kelompok adalah klebun, pengurus pembibitan, pedagang pupuk dan juragan/bandhol.

Abstract

This study was analyze the pattern of group communication tobacco farmers in three areas of tobacco production center in Madura, that was Sampang, Pamekasan and Sumenep. It also analyze how economic policies of political empowerment of tobacco farmers in Madura. This study was use a group communication theory, political economy and public policy. The research paradigm used an interpretive, qualitative research, descriptive research methods and participant observation research instrument, interview and focus group discussions. Communication pattern of tobacco farmers group formed by three issues that was the procurement of seeds, fertilizer and marketing. Opinion leader in group communication was Klebun, administrator seedling, fertilizer seller and skipper (bandhol).

Kata Kunci

pola komunikasi kelompok, kebijakan, ekonomi politik

Pendahuluan

Petani tembakau Madura menghadapi beragam kendala baik ekonomi maupun politik. Kondisi ini telah

berlangsung dari waktu ke waktu sehingga petani tembakau Madura semakin tidak memiliki keberdayaan dan kemandirian. Kondisi yang dihadapi

petani tembakau Madura juga semakin kompleks seiring dengan berbagai perkembangan kebijakan yang berlangsung cepat di lingkungan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Satu-satunya penopang bagi komoditas tembakau adalah keberadaan industri rokok nasional yang masih stabil. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap tembakau dan rokok juga masih tinggi. Menurut catatan Departemen Kesehatan RI (2008) bahwa proporsi pengeluaran bulanan rumah tangga untuk membeli produk tembakau di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2001, sebesar rata-rata 9,6% dari pengeluaran bulanan, pada kelompok berpenghasilan tinggi 7,5% dan kelompok berpenghasilan rendah 9,1%. Pengeluaran untuk produk tembakau ternyata lebih tinggi daripada pengeluaran.

Lahan pertanian tembakau di Madura merupakan penyuplai terbesar lahan pertanian tembakau di Indonesia. Total luas lahan pertanian tembakau di Indonesia 221.800 hektar (ha). Sementara lahan yang terdapat di Jawa Timur seluas 106.524 ha, sedangkan yang terdapat di Madura sekitar 53.000 ha. Secara umum, untuk di Indonesia, lahan yang terluas adalah di Jawa Timur dan sebagian besar lahan pertanian tembakau di Jawa Timur tersebut adalah di Madura.

Tanamantembakau merupakan tanaman yang mempunyai potensi di Pulau Madura khususnya pada Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Hal ini dapat dibuktikan dengan luas areal perkebunan yang terluas menempati urutan pertama untuk Kabupaten Pamekasan sebesar 24.465 ha dan Kabupaten Sumenep sebesar 16.798, sedangkan Kabupaten Bangkalan menempati urutan kelima belas dengan luas area sebesar 30 ha dan Kabupaten Sampang menempati urutan keenam

dengan luas area sebesar 5.062 ha dari 38 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur (Jawa Timur dalam Angka, 2006).

Di sisi lain kondisi petani tembakau masih jauh dari harapan untuk menuju kesejahteraan. Dari berbagai studi ditemukan adanya fenomena miskin pengetahuan sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi pada kelompok lain. Mereka masih kerap rugi dalam menanam tembakau karena tidak bisa memanfaatkan dan membaca situasi yang terjadi di sekitarnya. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi. Keuntungan yang didapatkan petani tembakau seringkali jauh dari harapan. Selain ancaman cuaca yang menurunkan kualitas tembakau, harga jual juga tidak bisa ditentukan petani yang memproduksi, tetapi oleh grader dari pabrik rokok yang seringkali tidak transparan.

Menghadapi situasi seperti ini, Pemerintah juga tidak tinggal diam. Berbagai program dikembangkan termasuk salah satunya yang dilakukan adalah program kemitraan. Namun, hingga saat ini *out put* masih jauh dari harapan. Petani masih menghadapi problem yang sebenarnya hampir sama (klasik) berlangsung dari waktu ke waktu. Mereka telah mengeluarkan biaya untuk menanam tembakau juga cukup besar, mulai dari penyediaan bibit, pemupukan, hingga perawatan dan kemungkinan gagal panen. Biaya tanam juga sebagian besar didapatkan sebagian petani melalui kredit dan berutang. Jika panen, petani tidak punya posisi tawar terhadap industri, terutama jika berkaitan dengan penentuan mutu tembakau yang menentukan harga. Di sisi lain memelihara tanaman tembakau juga

tergolong sangat rumit dan berat. Tidak jarang petani harus bekerja siang-malam untuk merawat tanamannya. Dua bulan sejak awal tanam adalah masa-masa paling berat bagi petani.

Salah satu riset yang pernah dilakukan Thomas Santoso (2001) bisa dijadikan bahan masukan mengenai adanya hubungan petani, bandol, dan juragan. Salah satu hasil yang diungkap adalah hubungan pribadi biasanya berlangsung antara pihak-pihak yang memiliki sifat-sifat yang sama. Hal ini terlihat jelas apabila juragan membutuhkan tambahan bandol, maka pertama kali akan menunjuk anggota keluarga atau kerabatnya. Jatuhnya pilihan kepada keluarga sendiri ini di samping untuk menjamin kesungguhan kerja dan pengabdian, juga biasanya secara kebetulan anggota keluarga yang bersangkutan memang memenuhi syarat untuk menjadi bandol. Misalnya pengetahuan tentang tata-cara penjualan tembakau dan memiliki kemampuan untuk mendapat tembakau dari petani. Seorang bandol harus mampu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang diucapkan juragan.¹

Dengan fenomena ini maka penelitian ini berusaha untuk memetakan bagaimana pola komunikasi kelompok petani tembakau Madura yang akan dijadikan sebagai basis penyusunan kebijakan bagi petani tembakau secara berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mencari akar permasalahan pokok terjadinya berbagai situasi yang tidak alami dan problem

yang terus melingkupi petani tembakau dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui simpul-simpul/pola komunikasi diantara petani tembakau di wilayah sentra penghasil tembakau di Madura. Melalui deskripsi pola komunikasi tersebut maka akan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura.

Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi kelompok petani tembakau di 3 (tiga) wilayah sentra penghasil tembakau di Madura ?
2. Melalui pola komunikasi kelompok yang ditemukan, bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pola komunikasi kelompok petani tembakau di Madura.
2. Melalui pola komunikasi kelompok tersebut diharapkan dapat menjadi basis bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura.

Tinjauan Pustaka Komunikasi Kelompok

Kita semua merupakan anggota dari berbagai kelompok, misalnya keluarga, tetapi kita juga berperan sebagai anggota tim, kelompok sepermainan (*peer-group*), organisasi

¹Thomas Santoso, "Tata Niaga Tembakau di Madura", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2 (September, 2001), hlm 27.

profesi, primordial, dan seterusnya. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Setiap karakteristik ini perlu diuraikan lebih lanjut.

Pertama, kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan, jumlahnya cukup kecil sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim maupun penerima. Definisi ini merupakan aspek penting dalam kelompok kecil. Pada umumnya kelompok kecil terdiri dari kira-kira 5 hingga 12 orang. Yang penting untuk diingat adalah bahwa setiap anggota harus bias berfungsi sebagai sumber maupun penerima dengan relatif mudah. Jika kelompok menjadi lebih besar maka hal ini akan semakin sulit dipenuhi.

Kedua, para anggota kelompok harus dihubungkan satu sama lain dengan beberapa cara. Orang-orang dalam gedung bioskop bukan merupakan kelompok, karena diantara mereka tidak ada hubungan satu sama lain. Di dalam kelompok kecil, perilaku seorang anggota menjadi nyata bagi semua anggota lainnya. *Ketiga*, diantara anggota kelompok harus ada beberapa tujuan yang sama. Hal ini tidak berarti bahwa semua anggota harus mempunyai tujuan yang persis sama untuk menjadi anggota kelompok. Tetapi pada umumnya harus ada alasan yang serupa bagi perorangan itu untuk berinteraksi.

Keempat, para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur yang terorganisasi. Pada saat strukturnya ketat - maka kelompok akan berfungsi menurut prosedur tertentu dimana setiap komentar harus mengikuti aturan yang tertulis. Pada saat

yang lain, strukturnya sangat longgar seperti pada suatu pertemuan sosial. Bagaimanapun juga, keduanya terdapat organisasi dan struktur. Dua orang tidak akan berbicara pada saat yang sama, komentar atau pertanyaan satu anggota akan dilayani oleh anggota lain dan tidak akan diabaikan.

Pada umumnya kelompok mengembangkan norma, atau peraturan mengenai perilaku yang diinginkan. Kadang-kadang peraturan ini dinyatakan secara eksplisit, namun kadang hanya bersifat implisit. Menurut Napier dan Gershenfeld (1987), para anggota kelompok akan menerima norma tersebut apabila : (1) anggota menginginkan keanggotaan yang kontinyu dalam kelompok, (2) pentingnya keanggotaan kelompok seseorang semakin tinggi, (3) kelompok bersifat kohesif, dan para anggota berhubungan sanagat erat, terikat satu sama lain, dan saling tergantung satu sama lain dan kelompok memenuhi kebutuhan mereka, (4) pelanggaran norma dihukum dengan reaksi yang negative atau dikucilkan dari kelompok.

Ada peran pokok yang harus dilakukan anggota dalam komunikasi kecil. Bagaimana individu bisa menjadi lebih efektif dalam berpartisipasi dalam kelompok kecil. Kenneth Benne dan Paul Sheats (1948) mengusulkan suatu klasifikasi mengenai peran anggota dalam komunikasi kelompok kecil yang masih merupakan tinjauan terbaik dalam topik penting ini. Benne dan Sheats membagi peran anggota menjadi tiga kelas umum : *pertama*, peran tugas kelompok, adalah peran yang membuat kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tujuan kelompok.

Kedua, peran membina dan mempertahankan kelompok, tidak seorang pun dan tidak satu kelompok pun yang selalu berorientasi pada tugas setiap saat. Kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya memiliki hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif – jika para anggota kelompok ingin merasa puas dan produktif.

Ketiga, peran individual, peran kelompok tugas dan peran membina dan mempertahankan kelompok semuanya bersifat produktif. Peran itu membantu kelompok dalam mencapai tujuannya, dan berorientasi pada kelompok. Peran yang disebutkan disini adalah peran kontra produktif. Peran ini menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan lebih berorientasi pada individu ketimbang kelompok.²

Ekonomi Politik Petani

Martin Staniland (1985) mengatakan bahwa ekonomi politik adalah sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan definisi tentang ekonomi politik tersebut sebagai berikut : "mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.

Kita mengetahui bahwa perokonomian tidak bisa hanya diserahkan pada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama

lain melalui mekanisme pasar. Di sana sini diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik.

Dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi politik dan kebijakan publik, dimana disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran yang mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan mengenai ekonomi politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasi kebijakan publik tersebut.

Teori ekonomi politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Marxisme. Marx cenderung melihat Negara dan proses politik secara umum sebagai hal yang sekunder. Begitu juga, baik Klasik maupun Marx cenderung mengasumsikan bahwa resolusi yang tepat bagi konflik ekonomi akan mengakhiri konflik politik. Dari ide Adam Smith bahwa kemajuan yang dicapai suatu masyarakat yang menganut mekanisme pasar adalah hasil ketidaksengajaan dari upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan dari mereka masing-masing, dielaborasi

²Joseph deVito, *Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar* (Jakarta: Professional Books, 1997). hlm. 154.

lebih lanjut oleh Marx dengan menjelaskan bahwa proses perubahan dalam metode produksi, hubungan sosial, dan cara-cara hidup semuanya sebagai hasil ketidaksengajaan dari upaya memperoleh keuntungan privat.

Inti pokok Marxisme adalah determinasi mekanistik “suprastruktur” politik (dan social, ideology serta budaya) oleh suatu basis ekonomi. Lebih jelas, bagi Marx yang menentukan segala-galanya, apakah itu politik, social, budaya, bahkan juga moral dan falsafah serta ideologi, adalah ekonomi, yaitu materi. Karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya, pandangan marxis ini sering juga disebut materialistic. Menurut Marx, moda produksi kehidupan materiallah yang mengondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum.

Istilah “ekonomi politik” yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip-prinsip yang reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang, atau dengan kata lain pembagian kerja sosial.

Proses ini terjadi menurut pola-pola perkembangan yang dalam pandangan ekonomi klasik tidak dipengaruhi oleh kehendak atau keinginan dari tiap-tiap orang. Memang individu-individu dalam perekonomian pasar bisa bertindak secara independen sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Matriks yang terdiri dari kebutuhan banyak individu akan mempengaruhi secara langsung apa yang terjadi di pasar.

Namun kebutuhan-kebutuhan pribadi ini sebenarnya berdiri diatas di atas sebuah struktur reproduksi yang obyektif dimana struktur reproduksi ini memiliki tuntutan-tuntutan sendiri yang akan mengendalikan individu di dalam menentukan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Karena struktur obyektif ini lebih dominan sifatnya maka teori Marxian lebih memfokuskan pada proses-proses reproduksi yang bersifat obyektif ini dan tidak memfokuskan telaaahnya pada proses subyektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu.³

Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, waktu dibagi atas tiga bagian ; masa lampau, masa kini dan masa depan. Dalam masa lampau, kebijakan-kebijakan yang dibuat telah selesai diterapkan. *Output* dari kebijakan sudah ada. Persoalan disini berkisar tentang bagaimana akibat atau *outcomes* yang terjadi ? Misalnya adalah, apakah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah terhadap petani tembakau sudah menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani ?

Dengan demikian perilaku analisis kebijakan dalam hal ini bersifat penilaian atau evaluatif. Sebagai suatu penilaian atas kebijakan masa lampau, ada empat karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, *value-focus* : tekanan dari penilaian ditujukan kepada

³James A. Caporaso & David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

pertimbangan tentang kepatutan nilai dan kesesuaian dengan keinginan masyarakat mengenai hasil (*outcomes*) atau perubahan yang timbul dalam masyarakat. Kedua, *fact-value interdependence*: penilaian melihat pada fakta dan nilai yang dihasilkan. Apakah *outcome* sata dampak yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan apakah memang benar dampak itu sebagai akibat dari kebijakan tersebut utatau akibat sampingan dari kebijakan lain ?

Ketiga, *present and past orientation*: dalam evaluasi kebijakan yang dibandingkan adalah kondisi masa lampau sebelum ada kebijakan dengan keadaan masa kini sesudah kebijakan itu dilaksanakan. Keempat, *value-duality*: penilaian mempunyai dua maksud, pertama, untuk melihat hasil yang dapat dicapai suatu kebijakan. Dalam hal ini hasil dari penilaian dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan penilaian itu (*ends*). Kedua, sebagai alat atau alasan untuk mengajukan rekomendasi baru (*means*).

Masa kini adalah masa yang sesungguhnya sedang kita lalui. Dalam perspektif kebijakan kondisi hari ini dipandang sebagai hasil atau akibat dari berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan pada waktu yang lalu. Kondisi petani tembakau hari ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah/pihak-pihak tertentu pada masa lalu. Selanjutnya dalam perspektif ini, kebijakan yang akan diambil pada masa kini akan menentukan kondisi masa yang akan datang.

Dengan demikian, masa sekarang merupakan saat penentuan untuk melanjutkan proses yang berlangsung dari masa lampau atau untuk melakukan perubahan arah dan perubahan intensitas

dari perubahan itu. Apa yang kita semai di masa lampau, kita tuai hari ini, dan apa yang kita semai pada hari ini, akan kita tuai di masa depan. Karena masa kini berada diantara dua masa tersebut, perilaku kebijakan dalam masa kini bersifat formulasi, pelaksanaan dan pemantauan (*monitoring*). Kebijakan yang dibuat pada waktu yang lalu diterapkan pada waktu sekarang. Kebijakan yang dibuat pada waktu sekarang, diterapkan pada waktu yang akan datang. Persoalannya, bagaimana merumuskan kebijakan dan dan bagaimana menerapkan atau melaksanakannya? Formulasi kebijakan ditentukan oleh prakiraan dan rekomendasi yang disampaikan. Namun demikian, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan rekomendasi, karena dalam proses perumusannya terjadi pergumulan kepentingan yang seringkali mengalahkan alasan rasional dan kebenaran.

Tahap ketiga dalam perspektif kebijakan adalah masa depan. Perilaku kebijakan yang menyangkut masa depan adalah prakiraan (*forecasting*). Berbeda dengan perkiraan yang menganalisis informasi sekarang untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) masalah sekarang, prakiraan dimaksudkan menganalisis informasi dari kondisi yang berkembang pada saat sekarang untuk mendapatkan kecenderungan yang dapat terjadi (*preskripsi*) di masa depan.

Apa yang dilakukan melalui prakiraan? Prakiraan berkaitan dengan dua informasi. Pertama, tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan kecenderungan yang sedang berlangsung pada saat ini tanpa ada sesuatu intervensi dari sesuatu kebijakan baru (*prediksi*). Kedua, kondisi yang akan dapat terjadi sebagai hasil dari

kebijakan baru (preskripsi). Yang terakhir ini menjadi advokasi dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan baru.

Konsekuensi dari uraian tentang dimensi waktu dalam perspektif kebijakan adalah suatu kebijakan tidak boleh hanya bertumpu semata-mata pada keadaan yang berlangsung pada hari ini, tanpa melihat keterkaitannya dengan masa lampau dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan sebagai buah atau akibat sampingan dari kebijakan yang kita buat hari ini. Teori kebijakan public mengajarkan kita kesadaran tentang keterkaitan antar waktu dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kerugian terjadi hanya karena tidak ada kesadaran waktu.⁴

Metode Penelitian

Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (*interpretive paradigm*). Peneliti dalam paradigma ini mempelajari tindakan sosial bermakna (*meaningful social action*), bukan sekedar tingkah laku eksternal atau yang dapat diamati dari masyarakat. Tindakan sosial adalah tindakan masyarakat untuk mendapatkan makna subyektif, ini adalah sebuah tindakan bertujuan dan dengan intensitas tertentu. Paradigma interpretif mencatat bahwa tiap tindakan manusia adalah bermakna dan khas.⁵

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang mendasarkan diri apada aspek *reflective*. Dimana kedudukan suatu

penelitian bersifat menggali interpretasi subyek.⁶Karakteristik utamanya adalah peneliti berusaha untuk memahami makna masyarakat yang mengkonstruksi tentang dunia mereka dan pengalaman mereka, itu berarti bagaimana masyarakat merasakan pengalaman mereka.⁷Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *instrument* pengumpulan data dan analisis data. Pemahaman adalah tujuan dari penelitian ini, dimana instrumennya (peneliti) dapat menjadi lebih *responsive* dan adaptif, dan melihat makna-makna ideal dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian yang terakhir, produk penelitian kualitatif adalah deskriptif yang kaya (*richly descriptive*).⁸

Hubungan teori/konsep dengan data empiris bersifat *exploratory*, teori dimunculkan atas data empiris. Sifat *exploratory* juga berarti hubungan teori dan data memberikan pengertian yang mendalam, kemampuan untuk memahami secara komprehensif mengenai situasi masalah penelitian. Strategi/proses penelitian fleksibel dan tidak berstruktur (Naresh K. Malhotra, 1999).⁹

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif ditujukan untuk:

⁶Thomas R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods* (USA: SAGE Publications, 1995), hlm. 271.

⁷Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3th(London: Sage Publications, 2002), hlm. 262.

⁸Sharan B. Merriam, *Qualitative Research in Practice: Example for Discussion and Analysis*(San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Company, 2002), hlm. 219.

⁹Naresh K.Malhotra, *Marketing Research : An Applied Orientation*, Third Edition(USA: Prentice Hall, Inc., 1999), hlm. 163.

⁴Said Zainal Abidin, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2008), hlm. 85.

⁵William Lawrence Neumann, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches* (USA: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 129.

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistics setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan/analitis, tetapi juga memadukan/sintetis. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, yaitu melakukan identifikasi komunikasi kelompok kecil dan pola komunikasi. Jenis observasinya adalah *participant observation*, artinya peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan terhadap pola komunikasi dalam latar alamiah (*naturalistics setting*) petani tembakau. Kemudian wawancara dan *Focus Group Discussions* (FGD), diskusi yang menyertakan petani tembakau, disertai dengan moderator dan asisten peneliti sebagai pengamat dan pencatat diskusi. Petani tembakau yang dilibatkan dalam FGD ini berkisar antara 7-12 orang. Pertanyaan yang akan didiskusikan disusun secara sistematis. Dari diskusi ini

dimaksudkan untuk dapat melakukan eksplorasi data dari petani tembakau.

Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah purposif (*purposive sampling*), untuk memastikan bahwa unsur tertentu dimasukkan ke dalam sample. Tingginya tingkat selektifitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan/strata yang relevan direpresentasikan dalam rancangan peneliti tertentu. Unsur khas yang ingin dimasukkan adalah komunikasi kelompok kecil, yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui pola komunikasinya.¹¹ Populasi penelitian ini meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan laporan naratif. Dalam analisis kualitatif, beberapa kegiatan dilakukan bersamaan oleh peneliti, yaitu mengumpulkan informasi dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah deskripsi atau bagan, dan menulis naskah kualitatif.¹² Peneliti akan melakukan pembuktian untuk memastikan keabsahan internal, dengan melakukan strategi sebagai berikut: triangulasi data, pemeriksaan pola komunikasi kelompok, pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah

¹⁰Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 94.

¹¹James Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 1999), hlm. 87.

¹²John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches* (London: Sage Publication, 1994), hlm. 119.

pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹³ Alat analisis yang digunakan adalah teori komunikasi kelompok, terutama untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dan alat analisis lainnya adalah teori ekonomi politik Marxis, terutama untuk menjawab rumusan masalah kedua. Setelah diketahui bagaimana pola komunikasi kelompok, kemudian digunakan analisa ekonomi politik Marxis.

Hasil dan Pembahasan

Pola Komunikasi Kelompok Petani Tembakau

Pola komunikasi kelompok yang terbentuk memiliki keragaman dalam hal jumlah individu, pola paling kecil terdiri dari 3 individu, sedang yang paling besar terdiri dari 14 individu. Pola ini terdiri dari anggota-anggota yang terhubung dalam komunikasi interpersonal. Baik secara tatap muka (*face to face*) maupun melalui media telepon/HP. Pola komunikasi kelompok ini terbentuk dari tiga isu, yaitu : isu pengadaan bibit, pupuk, dan pemasaran.

Opinion leader dalam pola komunikasi kelompok petani tembakau adalah pengurus pembibitan, pedagang pupuk, kepala desa (*klebun*), dan *bandhol*/pengepul/juragan. *Opinion leader* ini berkaitan dengan kemampuan individu mempengaruhi perilaku orang lain. Pengaruh yang terjadi dalam pola komunikasi kelompok adalah pada pengadaan bibit, penggunaan jenis dan takaran pupuk, maupun alur penjualan.

Dari pola komunikasi kelompok petani di Sumenep diketahui bahwa

untuk isu pengadaan bibit relatif tidak memiliki masalah atau kesulitan. Karena penduduk dengan klebun/kepala desa bersama-sama membudidayakan bibit tembakau. Faktor yang menjadi penghambat, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani justru munculnya penyakit *kolot* dan *tegeren* yang menimpa tanaman tembakau. Masalah pengadaan bibit biasanya pada pengadaan plastik, karena pembibitan masih menggunakan plastik.

Apabila bibit yang dikelola tidak bagus maka hasil panen biasanya juga tidak banyak. Karena harus membeli bibit dari luar, dan bibit dari luar belum tentu bagus hasilnya. Harga bibit paling rendah yang dijual keluar desa mulai Rp. 7.000,00. Kebanyakan penduduk membeli bibit dari pak Settar dan pak Mistarun. Untuk pengadaan bibit, masyarakat diluar desa biasanya membeli ke desa Soderreh. Sementara desa Soderreh tidak pernah membeli bibit keluar desa. Diantara kecamatan di kabupaten Sumenep, kecamatan Pasongsongan yang paling banyak menghasilkan bibit. Bahkan dari Sampang juga membeli bibit ke desa ini. Penanamannya perorangan rata-rata bisa mencapai 30.000 ribu batang.

Pola komunikasi kelompok di Pamekasan menunjukkan bahwa untuk pengadaan bibit, sebagian besar petani membeli bibit tembakau, ada juga yang menanam sendiri. Tahun 2009 desa pernah mendapat proyek dari Dinas Perkebunan. Luas lahan pembibitan ini mencapai 1 hektar dan ada pegawai dari Departemen Pertanian yang memberikan pendampingan dalam pembibitan. Untuk kecamatan Pakong lokasi pembibitannya di desa Lombang Timur, anggaran yang diberikan antara Rp.17.000.000,00 hingga Rp.21.000.000,00. Bibit ini dibagikan

¹³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 1999), hlm. 104.

secara gratis kepada petani, yang meliputi 3 kecamatan.

Untuk pembibitan di Sampang, sebenarnya sudah ada penyuluhan dari Pemerintah Daerah, tetapi hasilnya belum baik. Karena masyarakat tidak telaten dalam menangani pembibitan ini. Selain itu kalau melakukan pembibitan sendiri membutuhkan modal. Petani lebih sering membeli bibit dari luar, karena kualitasnya lebih bagus daripada menanam sendiri.

Pak *Klebun* menambahkan, persoalan pembibitan lebih disebabkan karena penduduk disini kurang telaten merawat bibit, pak *Klebun* pernah melakukan pembibitan sendiri kira-kira tahun 2005, dan hasilnya memang bagus karena dipelihara sungguh-sungguh dan hasilnya bagus. Kendalanya adalah butuh penanganan ekstra dalam hal pembibitan ini, seperti misalnya di musim hujan kalau bibit-bibit itu terkena air hujan maka setelah hujan harus segera disiram dengan air sumur agar tidak rusak atau membusuk, kalau bisa diantisipasi dengan cara ditutupi plastik atau terpal.

Kemudian untuk isu pupuk, pola komunikasi kelompok petani di Sumenep menunjukkan bahwa petani biasanya membeli pupuk di Dinas Pertanian setempat. Selama ini masalah pengadaan pupuk tidak terlalu sukar, namun sekitar tahun 2007 dan 2008 pernah terjadi kelangkaan pupuk. Ada berbagai macam jenis pupuk yang tersedia, namun yang paling banyak digunakan adalah pupuk ZA dan SP. Diantara kedua pupuk tersebut, yang paling baik dalam menghasilkan daun tembakau berkualitas adalah pupuk ZA. Pupuk organik yang berasal dari kompos produksi pabrik rokok Gudang Garam pernah diuji cobakan petani. Namun hasilnya tidak bagus dan tidak cocok.

Sehingga petani tidak lagi menggunakan pupuk organik ini. Petani lebih memilih untuk menggunakan pupuk ZA.

Sementara di Pamekasan, pengadaan pupuk lebih banyak melalui kelompok petani. Tidak ada masalah dalam pengadaan pupuk tembakau. Pupuk yang paling sering digunakan petani adalah ZA. Untuk mengetahui kebutuhan pupuk, biasanya anggota kelompok tani menyeter nama dan kebutuhan masing-masing ke ketua kelompok, kemudian langsung diteruskan ke distributor. Mereka didampingi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian. Dari data ini bisa diketahui kebutuhan pupuk se-kabupaten Pamekasan. Selama ini distribusi pupuk relatif lancar. Selain itu, pabrik juga pernah memproduksi pupuk. Seperti pupuk yang diproduksi oleh pabrik rokok Gudang Garam, Sampoerna dan Bentoel. Pupuk ini menghasilkan tembakau yang cukup bagus.

Untuk masalah pupuk di Sampang, selain menggunakan pupuk kimia, petani juga menggunakan pupuk kandang karena tiap rumah memiliki hewan ternak, sapi atau kambing. Pengadaan pupuk seringkali tidak bisa dikoordinasikan, karena masing-masing petani membeli sendiri-sendiri ke pasar. Sebagian yang lain membeli secara berkelompok antara 5 sampai 10 orang. Selama ini petani sudah memiliki kelompok tani dan kios resmi untuk pengadaan pupuk. Lama pemesanan pupuk biasanya sekitar satu minggu. Kios resmi mendapat kiriman pupuk biasanya 3 kali dalam seminggu. Kios resmi pupuk ada di Ombaran yang menangani wilayah Pandiyangan dan Gunung Rancak.

Kemudian untuk isu pemasaran, pola komunikasi kelompok di Sumenep

menunjukkan bahwa masalah pemasaran yang paling penting adalah dominasi pedagang Cina dalam menentukan kualitas dan harga tembakau. Pedagang Cina-lah yang menentukan apakah tembakau itu masuk dalam kualitas A, B atau C. Penduduk mengusulkan agar tiap kecamatan memiliki gudang tembakau. Hal ini untuk menjaga agar harga tembakau tidak dipermainkan. Selain itu juga tidak ada pabrik/produsen rokok yang ada di Sumenep. Sehingga tidak ada perbandingan dalam penentuan harga, pembelinya hanya dari satu pembeli saja. Tiap orang yang membeli tembakau akhirnya hanya akan membeli berdasarkan *bandrol* dari gudang. Sementara orang lain tidak boleh mempunyai *bandrol* ini. Gudang/pabrik yang mengeluarkan *bandrol* seperti itu adalah Gudang Garam.

Pernah ada usul/keinginan petani untuk mengundur masa tanam tembakau. Namun masa panen kelak juga harus memperhitungkan masa beli dari gudang. Biasanya gudang akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa dalam bulan ini akan ada pembelian tembakau. Rata-rata harga tembakau paling kecil Rp. 4.000,00 dan yang paling besar Rp 35.000,00. Gudang mempunyai banyak alasan untuk mempermainkan harga dan tidak ada pihak lain yang bisa menentukan harga. Gudang juga mengambil keuntungan dari kotoran/sisa daun tembakau yang ada dan ditumpuk sampai beberapa bal. Dalam setengah hari, gudang dapat memperoleh sepuluh bal.

Bila pabrik/gudang sudah buka, maka tembakau dijual, dan kalau sudah tutup, maka sulit bagi petani untuk menjual lagi. Tembakau yang akan ditimbun hanya tembakau dengan harga Rp 10.000,00 kebawah. Alasannya adalah

banyak hutang yang dimiliki petani ketika awal musim tanam. Bila tembakau disimpan sendiri di rumah, biasanya tembakau justru bertambah rusak. Kalau disimpan di tempat yang dimiliki petani biasanya juga menyebabkan jamur.

Modal petani ketika awal musim tanam tembakau adalah dengan cara meminjam uang. Maka ketika musim panen tiba, tembakau harus secepatnya dijual, ini untuk menyiasati agar harga jualnya minimal Rp. 15.000,00. Sementara pinjaman dari pemerintah tidak ada. Dulu gudang pernah memberikan pinjaman, tapi sistem penjualannya tidak bebas, dan semua panen harus dibawa ke Gudang Garam.

Selama ini belum pernah ada pertemuan antara petani, pedagang, dan pemerintah yang membahas masalah harga. Pernah ada kerja sama dengan pedagang Cina, yang tujuannya supaya harga tembakau stabil. Juga pernah ada pembicaraan dengan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian ada patokan harga tembakau yang disepakati dengan Pemda. Namun belum menunjukkan hasil yang diharapkan petani. Petani tembakau pernah mengadakan demo ke Pemda dan gudang. Alasannya karena penjualan tembakau tidak memiliki standar yang sama. Untuk jenis tembakau yang sama, kualitas dan harganya bisa berbeda-beda. Dan apabila tembakau ini dibawa pulang, maka petani malah bertambah rugi, maka mau tidak mau tembakau harus di jual.

Pernah ada petani tembakau yang menyaingi pedagang Cina, yaitu H. Nawawi, tapi sekarang sudah tidak ada. Juga pernah ada janji dari Pemda, tentang kerja sama dengan Jerman, terkait masalah pembelian tembakau. Petani berharap, untuk menanggulangi penentuan kualitas tembakau, agar

diusahakan alat pendeteksi standar kualitas tembakau. Agar kualitas dan harga tembakau tidak dipermainkan lagi. Dinas-dinas yang ada di Pemda tidak bisa berbuat banyak karena kalah dengan *amplop* dari pedagang Cina. Petani bisa juga menawar harga, tetapi hal itu sangat bergantung pada hubungan baik dan pendekatan emosional dengan pedagang Cina.

Untuk isu pemasaran di Pamekasan juga hampir sama dengan Sumenep, yaitu tidak ada ukuran yang tetap dalam menentukan kualitas dan harga tembakau, misalnya bila tembakau dilihat kuning maka harganya mahal. Tapi bila tidak tercium aroma/bau gunung/lahan, maka harga tembakau tersebut menjadi murah. Jadi sulit dalam menentukan harga dan kualitas tembakau. Gudang Garam biasanya menyukai tembakau dengan warna kuning masak dan Sampoerna lebih menyukai tembakau dengan warna biru.

Petani bisa langsung menjual ke gudang tapi lewat orang lain. Bila pabrik menyatakan tutup, maka petani akan bingung, lalu tembakau akan diobral. Petani belum untung jika harga tembakau 15.000,00/kg, harga tembakau minimal Rp. 20.000,00, itupun baru balik modal. Untung yang didapat sedikit dan upah kerja tidak dihitung. Air yang digunakan untuk menyiram tembakau harus beli, dengan harga Rp 500.000,00/1.000 liter. Pembelian air itu dilakukan sampai masa panen tiba.

Pemasaran adalah kendala yang paling sulit, dan belum ada solusinya, termasuk dari Pemerintah Daerah (Pemda). Tidak ada patokan harga yang pasti, harga selalu tidak stabil. Perkiraan petani terhadap kualitas dan harga tembakau yang mereka miliki seringkali meleset. Ketika sampai di gudang

kualitas dan harga tembakau selalu berbeda dengan perkiraan petani. Bisa jadi satu tembakau masuk kategori A dan satunya lagi masuk kategori B. Bahkan kadang tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut.

Sering terjadi perbedaan penentuan kualitas dan harga tembakau antara gudang dan pabrik. Ketika gudang menerima tembakau petani, kadang pabrik tidak selalu menerimanya, dan akan menegur gudang. Sehingga petani menjadi ragu dengan kualitas tembakau yang dimilikinya. Akibatnya harga tembakau menjadi naik turun secara drastis. Petani pernah melakukan protes atau mengadakan aksi ke gudang dan kantor Bupati. Namun kualitas dan harga tetap ditentukan pabrik, mereka biasanya beralasan dengan kualitas tembakau yang rendah.

Harapan petani, masalah harga tembakau paling rendah Rp. 20.000,00 – Rp. 30.000,00, dan harga ini tetap stabil hingga tembakau habis. Pemerintah pernah melakukan pertemuan dengan pihak pedagang/gudang dan petani. Namun dalam praktek hasilnya masih jauh dari harapan. Pabrik selalu beralasan bahwa tembakau dari petani memiliki kualitas jelek, sehingga harganya tidak sampai Rp. 20.000,00.

Sementara untuk isu pemasaran di Sampang, persoalannya juga tidak jauh beda dengan Sumenep dan Pamekasan. Tiap perusahaan memiliki kriteria/ciri tersendiri dalam menentukan kualitas tembakau. Tidak ada upaya dari pemerintah untuk menangani pemasaran tembakau, sehingga yang menentukan harga pabrik. Bila gudang tidak mau membeli tembakau, petani yang merugi. Kadang tembakau sudah mau panen tapi gudang belum buka. Tahun 2008 kemarin harga tembakau hancur yaitu Rp. 1.500,00

- Rp. 3.000,00 dan paling bagus hanya Rp. 4.200,00.

Petani tidak mungkin menimbun tembakau, setelah panen harus segera dijual, karena petani tidak punya tempat penyimpanan. Selain itu uang modal menanam tembakau adalah uang pinjaman, apalagi bila uang itu adalah uang pinjaman yang beranak/rentenir. Misalnya pinjam Rp. 1.000.000,00 bisa membengkak menjadi Rp. 3.000.000,00 juta pada saat panen. Kalau panennya bagus mungkin tidak masalah, tapi kalau gagal panen, maka beban petani menjadi semakin berat. Ada yang pinjam uang dengan cara meminjam sesuai harga sapi, misalnya meminjam satu sapi seharga Rp. 5.000.000,00 untuk tahun sekarang. Bila tahun depan harga sapi menjadi Rp. 7.000.000,00, maka yang harus dibayar seharga itu. Warga juga pinjam ke pak *Klebun* tapi tidak berbunga, nanti bayar hutangnya kalau tembakau sudah laku dan menjualnya juga harus ke pak *Klebun*.

Semua petani menjual tembakau ke pak *Klebun* karena yang punya gudang hanya pak *Klebun*, kecuali jika pak *Klebun* sudah tidak sanggup membeli, baru dijual ke *Bandhol* dari luar desa. Modal bertani tembakau rata-rata Rp. 5.000.000,00 - Rp. 6.500.000,00. Kalau petani rugi dan modalnya saja tidak kembali, bisa-bisa yang ada dibawah tembakau itu yang dijual (tanahnya). Kalau kualitas bagus dan harga bagus, harga tembakau bisa mencapai Rp. 25.000,00-Rp. 30.000,00. Dengan harga ini, petani bisa untung 4 kali lipat dari modal.

Bupati pernah mengeluarkan kebijakan untuk mematok harga tembakau sebesar Rp. 30.000,00/kg kepada gudang. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau kebijakan pabrik harga turun, maka Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak. Menurut pak

Klebun, posisi tawar petani rendah, misalnya petani mau menimbun tembakau, agar bisa lebih tahan lama dan bisa dijual kalau harga sudah tinggi. Namun masih kekurangan modal, karena paling besar modal pak *Klebun* hanya sekitar Rp. 200.000.000,00 untuk membeli tembakau warga. Bahkan pak *Klebun* masih pinjam ke bank dengan bunga 7 % per tahunnya. Sementara pedagang Cina modalnya milyaran bahkan trilyunan karena dibantu pabrik. Maka pedagang Cina jauh lebih kuat posisinya dalam menentukan harga tembakau dari petani.

Pak *Klebun* tidak pernah pinjam uang ke pabrik/pedagang Cina karena nanti semakin dipermainkan pada saat menjual hasil tembakau. Misalnya pinjam modal sama gudang maka dipotong seribu rupiah per kg-nya. Kalau harganya Rp. 18.000,00 maka dipotong menjadi Rp. 17.000,00. Mengenai penentuan kualitas tembakau, masing-masing gudang berbeda-beda, Gudang Garam menginginkan tembakau warna kuning, sementara Djarum justru menginginkan yang hijau.

Menurut pak *Klebun*, sebenarnya untuk mengatasi itu harus disaingi, petani harus punya gudang yang besar dan bagus. Jadi apabila harga sedang turun dari gudang Cina, pengepul bisa menampung tembakau dari penduduk. Ketika tembakau tidak ada stoknya, gudang akan menaikkan harga. Pada saat itulah tembakau di gudang dijual, maka petani bisa mendapatkan untung dari penjualan itu.

Kebijakan Pemberdayaan

Dari analisa pola komunikasi kelompok tersebut, maka kebijakan yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau adalah : *pertama*,

penentuan patokan harga tembakau. Seperti yang pernah dilakukan Pemda Sampang dengan mematok harga terendah sebesar Rp. 30.000,00. Namun program ini berhenti di tengah jalan. Maka sebelum memberikan kebijakan ini, Pemda perlu melegalisasi ketentuan patokan harga tembakau ini. Kemudian menyiapkan supra struktur yang akan mengontrol praktek kebijakan ini di tingkat lapangan. Terutama ketika petani menjual tembakau ke gudang.

Kedua, sangat mendesak untuk membuat kebijakan tentang standardisasi kualitas tembakau, baik untuk kualitas A, B, dan C. Standardisasi ini perlu karena selama ini ukuran kualitas tembakau hanya ditentukan oleh pembeli/gudang. Tidak ada ukuran yang secara kuantitatif bisa ditunjukkan/dibuktikan tentang kualitas tembakau, apakah ia masuk kualitas A, B, atau C. Sehingga ukuran kualitas tembakau tersebut sangat subyektif. Petani tidak memiliki hak untuk menentukan ukuran kualitas itu. Gudang dapat mempermainkan kualitas ini ketika membeli tembakau dari petani/pegepul. Atau bisa juga Pemda mengadakan alat ukur kualitas tembakau, sehingga ukuran tersebut menjadi lebih kuantitatif dan obyektif.

Ketiga, pengadaan modal untuk petani tembakau. Selama ini modal petani ketika mau menanam tembakau adalah dengan menjual emas, sapi atau utang. Untuk menangani masalah modal perlu dibentuk koperasi atau kelompok tani. Koperasi dan kelompok tani ini bisa digunakan untuk mengorganisasi modal petani. Sehingga ketika masa tanam tembakau tiba, tidak perlu lagi utang. Pemda tentu bisa memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi dan kelompok tani ini. Bisa juga Pemda memberi bantuan berupa

pinjaman lunak bagi petani melalui koperasi dan kelompok tani.

Keempat, untuk meningkatkan daya tawar petani ketika menjual tembakau ke pedagang/gudang. Tiap kecamatan perlu untuk memiliki gudang yang besar dan baik untuk menampung tembakau petani bila harga sedang tidak stabil. Pemda bisa bekerja sama dengan Klebun dan warga untuk bersama-sama membangun gudang ini. Karena keberadaan gudang penting untuk menyimpan tembakau agar kualitasnya tetap terjaga baik.

Kelima, warga perlu membuat kontrak politik dengan para calon legislatif ketika ada pemilu. Dengan kontrak politik untuk perbaikan nasib petani tembakau ini, kepentingan petani bisa lebih diperjuangkan di lembaga legislatif (DPRD). Warga hanya akan memilih calon legislatif yang punya komitmen untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan sosial ekonomi petani tembakau.

Bila persoalan dianalisa dengan cara pandang ekonomi politik Marxis, maka memang materi sangat berpengaruh terhadap sisi kehidupan sosial ekonomi. Karena materilah yang pada akhirnya menentukan praktik-praktik sosial, ekonomi, dan politik. Pemilik alat produksi yang memiliki otoritas lebih dalam menentukan pasar. Pemilik modal, gudang, dan alat produksi/pabrik yang menentukan praktik-praktik pasar. Di dalamnya termasuk harga, distribusi barang, kualitas, dan modal itu sendiri.

Penutup

Pola komunikasi kelompok yang terbentuk merupakan komunikasi kelompok yang didasarkan pada isu pengadaan bibit, pupuk, dan pemasaran.

Opinion leader dalam pola komunikasi petani tembakau adalah pengurus pembibitan, pedagang pupuk, kepala desa (*klebun*), dan bandol/pegepul/juragan. *Opinion leader* ini berkaitan dengan kemampuan individu memengaruhi perilaku orang lain. Pengaruh yang terjadi dalam klik adalah pada pengadaan bibit, penggunaan jenis dan takaran pupuk, maupun alur penjualan. Dalam pola komunikasi diukur dari banyaknya pilihan yang diterima individu dalam membicarakan topik tertentu.

Dari analisa pola komunikasi tersebut, maka kebijakan yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah: *pertama*, penentuan patokan harga tembakau. *Kedua*, sangat mendesak untuk membuat kebijakan tentang standarisasi kualitas tembakau, baik untuk kualitas A, B, dan C. *Ketiga*, pengadaan modal untuk petani tembakau. *Keempat*, untuk meningkatkan daya tawar petani ketika menjual tembakau ke pedagang/gudang. Tiap kecamatan perlu untuk memiliki gudang yang besar dan baik untuk menampung tembakau petani bila harga sedang tidak stabil. *Kelima*, warga perlu membuat kontrak politik dengan para calon legislatif ketika ada pemilu. Dengan kontrak politik untuk perbaikan nasib petani tembakau ini, kepentingan petani bisa lebih diperjuangkan di lembaga legislatif (DPRD). Warga hanya akan memilih calon legislatif yang punya komitmen untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan sosial ekonomi petani tembakau.

Daftar Pustaka

Buku:

Abidin, Said Zainal. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi*

Politik. Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2008.

Black, James & Dean J. Champion. *MetodedanMasalahPenelitianSosial*. Bandung: RefikaAditama, 1999.

Caporaso, James A.&David P. Levine. *Teori-TeoriEkonomiPolitik*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.

Creswell, John W. *Research Design, Qualitative& Quantitative Approaches*. London: Sage Publication, 1994.

Deliarinov. *Ekonomi Politik : Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.

DeVito, Joseph. *Komunikasi Antar Manusia : Kuliah Dasar*. Jakarta: Professional Books, 1997.

Lindlof, Thomas R. *Qualitative Communication Research Methods*. USA: SAGE Publications, 1995.

Malhotra, Naresh K. *Marketing Research : An Applied Orientation*. Third Edition. USA: Prentice Hall, Inc., 1999.

Merriam, Sharan B. *Qualitative Research in Practice: Example for Discussion and Analysis*. San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Company, 2002.

Moleong, Lexy J. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya, 1999.

Neumann, William Lawrence. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Allyn and Bacon, 2000.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Third Edition. London: Sage Publications, 2002.

Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Thomas Santoso, "Tata Niaga Tembakau di Madura", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Universitas Kristen Petra. Vol. 3, No. 2 (September, 2001), hlm 27.

INTERNET

<http://www.detiknews.com/read/2008/11/25/012520/1042299/10/kerap-rugi-2-dari-3-petani-tembakau-ingin-banting-setir>. (diakses tanggal 16 Februari 2008)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/08/14321088/pertembakauan.di.madura>. (diakses tanggal 28 Januari 2009)

<http://www.antarajatim.com/index.php?ref=disp&id=4106> 1.001 Cara Petani Tembakau Madura Kejar Harga. (diakses tanggal 3 Februari 2009)

